

Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Studi Pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau

¹ Muhammad Ramdhany, Okta Karneli, Lie Othman

¹Universitas Riau, Indonesia; muhammad.ramdhany7015@grad.unri.ac.id,

Received: August 28, 2023; In Revised: November 21, 2023; Accepted: December 24, 2023

Abstract

This research is motivated by the phenomenon that regional governments in Indonesia have not fully optimized their regional financial performance. The good financial performance of a regional government can be seen through how the regional government manages its Regional Budget and Revenues which are used to provide financing for development needs and activities in the region. Financial performance that runs well and progresses will be directly proportional to the increase in regional income. This means that here there is efficiency and effectiveness of financial working power in local government. The aim of this research is to analyze the working capacity of Regional Government finances, both Provinces, Regencies and Cities in the Riau Province region by measuring the level of Efficiency, Effectiveness of Regional Original Income, Regional Finance, Degree of Fiscal Decentralization, independence from Finance in the Region, as well as the SiLPA Financing Level. The results of the research show that the working capacity of Regional Finance in the form of Regional Financial Efficiency, Effectiveness of Regional Original Income, Degree of Fiscal Decentralization, independence from Regional Finance, and the Level of SiLPA Financing together influence and have significance on capital expenditure for Public Services. Financial independence in the regions partially has no significance or influence on the context of capital expenditure for public services. The partial effectiveness of Original Regional Income has no significance and also has no influence on Capital Expenditures for Public Services. Financial efficiency in regions partially has significance and also influences capital expenditure for public services. The partial level of SiLPA financing has no significance or influence on capital expenditure for public services.

Keywords: Local Government; Fiscal Decentralization, Regional Budget and Expenditure; Financial Performance

Pendahuluan

Pelaksanaan Otonomi di Daerah menjadikan Pemerintah Daerah wajib untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya tanpa adanya diskriminasi, memiliki pemerataan serta dapat mempunyai kesinambungan. Keharusan ini terwujud atau terselesaikan jikalau Pemerintah Daerah memiliki kapabilitas melakukan pengelolaan dari potensi sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan juga sumber daya alam pada konteks yang maksimal (Halim, 2012). Pemerintah Daerah haruslah mempunyai kapabilitas supaya bisa melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimiliki, khususnya pada konteks sumber di sisi keuangan secara optimal agar dapat meningkatkan pelayanan khususnya kepada masyarakat. Yang pasti dalam mengukur apakah sumber daya keuangan ini dapat berjalan secara optimal adalah dengan melihat kinerja keuangan daerah tersebut.

Berlandaskan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, satu diantara referensi dari pendapatan pada daerah ialah dari pelaksanaan kelola kekayaan yang dimiliki daerah, retribusi, serta penghasilan pajak dan juga pendapatan yang lainnya yang mana diperoleh dari PAD berdasarkan pada variabel yang sah. Meningkatnya PAD diekspektasikan bisa mengoptimalkan pembelanjaan dari modal agar pemerintah dapat melaksanakan kebijakan publiknya salah satunya memberikan pelayanan pada publik yang memiliki kualitas pada kategori baik. Kualitas pelayanan publik lazimnya bergantung dari bagaimana kualitas dan kuantitas belanja modal atau infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah. Teori terkait pelayanan publik sebagaimana yang dipaparkan Mahmudi (2019) menyatakan bahwasanya pelayanan publik merupakan keseluruhan aktivitas pelayanan yang dilakukan dan diinisiasi dari yang melakukan penyelenggaraan pada pelayanan publik tersebut sebagai usaha dalam memnuhi keperluan dari publik serta implementasi hal-hal yang ditentukan oleh regulasi dan peraturan yang ada.

Atas teori yang ada, suatu kondisi ideal adalah ketika kinerja keuangan yang baik berkontribusi kepada peningkatan PAD, maka Pemerintahan yang menjalankan kebijakan publik dan pelayanan publik akan membelanjakan sumberdayanya kepada infrastruktur atau belanja modal yang menyentuh langsung kepada penyelesaian permasalahan dimasyarakat seperti pembuatan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Akan tetapi terjadinya peningkatan PAD belum diikuti oleh meningkatnya peletakkan dari pembelanjaan modal secara relevan. Hal tersebut lantaran PAD tersebut lebih banyak dipakai untuk anggaran belanja lainnya (Putro, 2010). Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat, memberikan pembawaan transformasi fundamental dalam mekanisme dan juga sistematika dari tata kelola di pemerintah daerah. Anggaran untuk perimbangan yang mana tercakup didalamnya yaitu DAK, DBH, dan DAU ialah dana yang ditransfer oleh pusat terhadap daerah.

Jika melihat tren belanja yang terdapat pada daerah di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten pada Provinsi Riau Tahun 2016-2022, berdasarkan pagu APBD menunjukkan bahwa struktur belanja di daerah Kota ataupun Kabupaten di Provinsi Riau pada strukturisasi APBD masih dominan dipegang oleh pembelanjaan terkait pegawai. Untuk periodisasi pada waktu tersendiri yakni 3 tahun terbaru (2020-2022), terjadi pengurangan belanja modal namun ada peningkatan di belanja barang & jasa. Ini menjadikan asumsi bahwa pemerintah daerah belum memprioritaskan belanja modal dalam belanja daerahnya.

Satu dari sekian peralatan untuk melakukan analisa terhadap daya kerja dari keuangan yang ada pada pemerintahan di daerah ialah melalui pelaksanaan proses analisis dari rasio mengenai keuangan kepada APBD yang sudah dilaksanakan dan juga dilakukan penetapan akan hal tersebut (Halim, 2012). Beberapa dari rasio terkait keuangan yang bisa dilakukan penggunaan supaya melakukan pengukuran terkait akuntabilitas dari pemerintah yang ada di daerah yakni rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio terkait daya mandiri. (Halim, 2012). Penganalisaan dari rasio terkait keuangan dalam APBD dilaksanakan melalui pengkomparasian resultan yang digapai melalui satu periodisasi yang dikomparasikan terhadap periodisasi sebelumnya yang kemudian bisa didapat terkait bagaimana aspek kecenderungan yang bisa terjadi (Suratna, dalam Melina dkk., 2021). Penganalisaan terkait keuangan ialah upaya melakukan identifikasi karakteristik dan juga sifat keuangan berlandaskan pada laporan dari keuangan yang terdapat kesediaannya. Di internal organisasi dari pemerintah supaya melakukan pengukuran daya kerja terkait keuangan terdapat beberapa indikator dari daya kerja, yakni rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan juga rasio mandiri keuangan yang terdapat pada daerah (Pratiwi, 2014).

Menurut Halim (2014) Kemandirian Keuangan Daerah memperlihatkan kapabilitas dari daerah pada konteks melakukan pembiayaan secara sendiri aktivitas pelayanan, pembangunan dan juga pemerintahan terhadap masyarakat yang mana sudah melakukan pemnayaran pajak dan retribusi menjadi muara penghasilan yang diperlukan di sisi daerah. Bentuk mandiri dari daerah didapatkan lewat pembagian Pendapatan yang Asli Daerah kepada Dana Transfer, yang mana makin meningkat atau tingginya tingkatan kemandirian dari sebuah daerah untuk masing-masing tahunnya, dengan masyarakat dianggap tinggi partisipasinya pada konteks melakukan pembayaran dari retribusi dan juga pajak yang mana ialah variabel mendasar dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga berdampak kepada kinerja keuangannya semakin baik.

Derajat dari desentralisasi menunjukkan tanggung jawab dan juga hak yang mana dilaksanakan pemberian dari sisi pemerintahan di pusat terhadap pemerintah di daerah supaya mengelola dan juga melakukan penggalan dari penghasilan, dimana apabila PAD menjadi lebih tinggi, dengan demikian makin meningkat pula kapabilitas dari pemerintah di daerah pada konteks pengimplementasian (Daling, dalam Rinta et al., 2019). Pengukuran derajat terkait desentralisasi di ranah fiskal dihitung melalui membagi PAD dengan Total dari Pendapatan Daerah.

Efektivitas dari PAD ialah kapabilitas yang dimiliki pemerintah didaerah pada konteks melakukan mobilisasi penerimaan dari PAD selaras terkait apa yang sudah dilakukan penargetan (Mahmudi, dalam Rinta et al., 2019). Perhitungan Efektivitas PAD melalui metode pembagian pelaksanaan dari penerimaan PAD melalui sasaran untuk menerima PAD tersebut. Peningkatan terhadap tingkatan efektifisa PAD menjadi lebih tinggi atau bertambah, dengan demikian menjadi lebih baik pula daya kerja dari pemerintahan di daerah ketika menjalankan PAD nya. PAD yang meningkat akan berkontribusi dalam penambahan jumlah/alokasi atas pembelajaran dari modal pada konteks memenuhi kebutuhan untuk melayani publik/masyarakat. Menurut Halim (2007) rasio dari efisiensi terkait keuangan pada daerah ialah rasio yang memberikan visualisasi komparasi diantara besaran dari anggaran terkait pengeluaran dalam hal mendapatkan sebuah pendapatan melalui realisasi dari pendapat yang dilakukan penerimaan atas hal tersebut. Daya kerja dai keuangan pemerintah daerah pada konteks melaksanakan pemungutan penghasilan diklasifikasikan atau tergolong efisien jikalau rasio yang dilakukan pencapaian berada pada kategori kurang dari pada satu ataupun dibawah 100%.

Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, SiLPA ialah ahsil dari selisih yang mana lebih terhadap konteks pelaksanaan ataupun perwujudan pengeluaran dan juga perwujudan anggaran pada kurun waktu 1 (satu) masa anggaran tersendiri. SiLPA mempresentasikan sisa kas yang timbul dari pengimplementasian pendapatan dari daerah yang mana lebih daripada pelaksanaan belanja di daerah. Untuk mengetahui serta menganalisis daya kerja Keuangan dari pemerintahan daerah Provinsi, Kota serta Kabupaten pada Provinsi Riau di era periode tahun 2016 hingga waktu 2020 berdasarkan rasio dari Kemandirian yang terdapat pada Keuangan Daerah, rasio di sektor Derajat Fiskal, rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan juga rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada konteks Desentralisasi, dan rasio Tingkat Pembiayaan SILPA, serta adakah pengaruhnya kepada pembelanjaan modal bagi Pelayanan terhadap Publik baik pada konteks yang parsial ataupun pada ranah simultan. Dari penelitian ini didapati hipotesis, sebagai berikut:

H_1 : Daya Kerja dari Keuangan pada Pemerintahan di Daerah berupa sikap mandiri pada konteks Keuangan di Daerah, Tingkatan Desentralisasi pada konteks Fiskal, keefektifan pada ranah Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi dalam konteks keuangan yang dimiliki daerah serta tingkatan dalam SILPA pada konteks yang simultan berpengaruh kepada pembelanjaan dari Modal bagi Pelayanan Publik.

H₂ : Daya Kerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk tingkatan mandiri dari Keuangan di Daerah dalam bentuk yang parsial memiliki implikasi pada pembelanjaan modal untuk Pelayanan Publik.

H₃ : Daya Kerja Keuangan pada Pemerintahan di Daerah yakni Tingkatan dari Desentralisasi di lingkup Fiskal pada cakupan yang parsial berimplikasi kepada pembelanjaan dari modal dalam hal pelayanan pada publik.

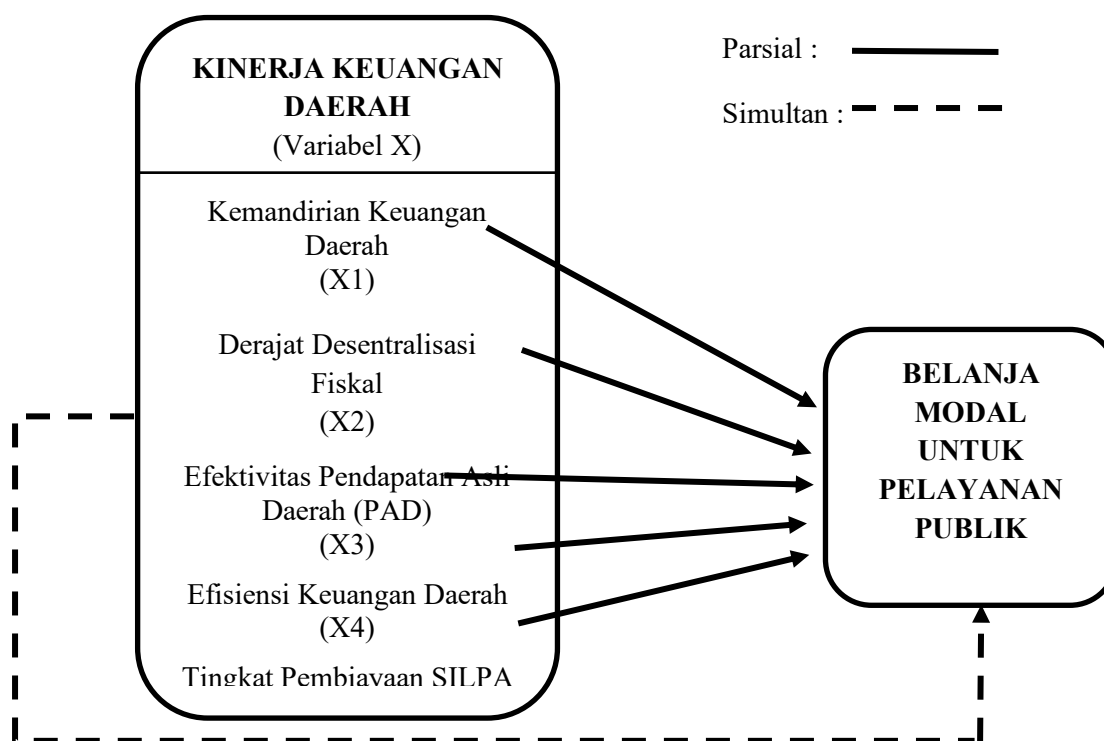
H₄ : Daya Kerja Keuangan pada Pemerintahan di Daerah pada jenis keefektifan dari pendapatan yang secara murni berasal dari daerah pada cakupan yang parsial berimplikasi kepada pembelanjaan dari modal dalam hal pelayanan pada publik.

H₅ : Daya Kerja Keuangan pada Pemerintahan di Daerah berupa Efisiensi Keuangan dari Daerah pada cakupan yang parsial berimplikasi kepada pembelanjaan dari modal dalam hal pelayanan pada publik.

H₆ : Daya Kerja Keuangan pada Pemerintahan di Daerah berupa Tingkatan membiayai SILPA pada cakupan yang parsial berimplikasi kepada pembelanjaan dari modal dalam hal pelayanan pada publik.

Dari hipotesis diatas, dapat diilustrasikan melalui kerangka konseptual, yakni:

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023

Metode Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian eksplanatif yang sifatnya kuantitatif. Populasi pada penelitian ini ialah Pemerintahan di Daerah Kota dan juga Kabupaten pada Provinsi Riau berlandaskan rasionalisasi (*judgment sampling*) terdapatnya kesediaan data yang memberikan penyampaian dari Laporan pengimplementasian APBD kurun waktu 2016 sampai 2020 secara komplit berasal dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini memakai sampel kontekstual jenuh. Teknik sampling jenuh ialah suatu kondisi yang mana keseluruhan dari anggota yang terdapat pada populasi dipakai sebagai suatu sampel. Dengan jumlah Kabupaten/Kota/Provinsi sebanyak 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah dengan data *time series* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari 2016 sampai dengan 2020 (selama 5 tahun), maka besaran sampel dan populasi adalah sebanyak 65 (enam puluh lima). Data yang dilakukan analisa pada penelitian ini ialah data yang termasuk kategori sekunder, yakni data yang sudah dilakukan pengolahan lebih jauh dan juga dilakukan penyajian dari entitas lainnya. Penelitian ini memakai *pooled data*, kurun waktu 2016 hingga periode 2020. Data pada penelitian diantaranya yakni dalam bentuk Data Realisasi dari Pendapatan Asli Daerah, Total dari penerimaan yang terdapat di Daerah, Dana Alokasi Umum, serta pembelanjaan Daerah khususnya Belanja Modal atas Laporan dari perealisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten dan juga Kota pada Provinsi Riau tahun 2016-2020.

Alat dalam melakukan analisa yang dipakai ialah analisa regresi dengan konsep linear berganda. Teknik yang dipakai dalam melakukan pencarian dari resultan persamaan apda regresi ialah melalui analisa konteks *Least Squares* ataupun kuadrat paling kecil melalui meminimalisir total dari kuadrat terkait kesalahan kuadrat. Adapun formula dari regresi linear berganda itu bisa dilakukan perumusan secara sederhana pada konteks berikut yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien Regresi
- X_1 : Kemandirian Keuangan Daerah
- X_2 : Derajat Desentralisasi Fiskal
- X_3 : Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X_4 : Efisiensi Keuangan Daerah
- X_5 : Tingkat Pembiayaan SILPA
- ϵ : *Standart Error*

Pada penelitian ini dilaksanakan pengujian terkait asumsi klasik yang mana mencakup di dalamnya pengujian Normalitas, pengujian Autokorelasi, pengujian Multikolinieritas, serta pengujian Heterokedastisitas. Untuk melakukan uji hipotesis dilakukan dengan pengujian Statistik t, Pengujian Koefisien Determinasi, serta Pengujian Statistik F.

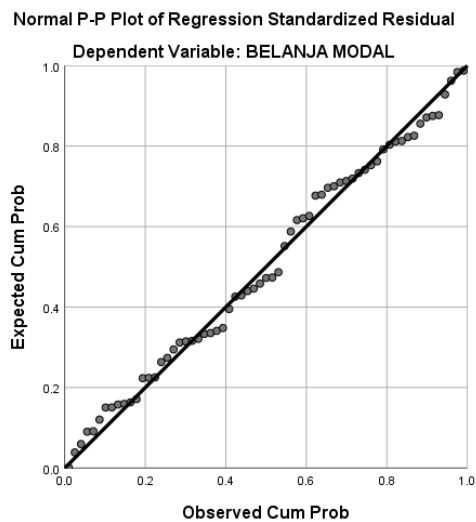
Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

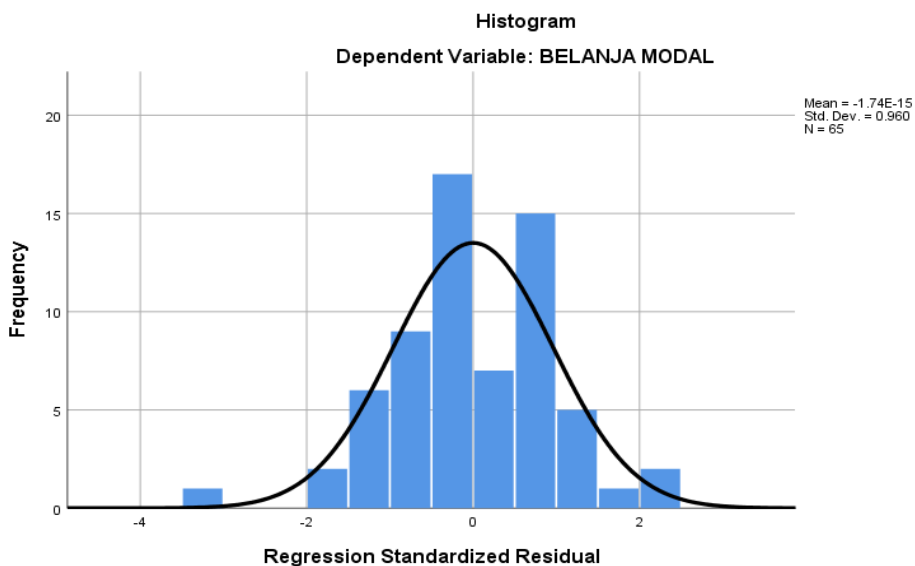
Pengujian normalitas dilaksanakan melalui pemakaian pengujian pada konteks grafik P-P Plot, Histogram serta pengujian Statistik Kolmogrov-Smirnov dalam hal melakukan uji residual dari bentuk regresi yang terlihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2
Grafik P-Plot



Sumber: Data dilakukan pengolahan memakai SPSS 26, 2023

Gambar 3
Grafik Histogram



Sumber: Data dilakukan pengolahan memakai SPSS 26, 2023

Tabel 1
 Resultan Pengujian Normalitas memakai Uji Statistik Kolmogrov-Smirnov
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.24917959
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.058
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Resultan uji normalitas melalui pemakaian analisa secara grafik yakni melalui pemakaian grafik *normal probability plot* dan juga histogram. Resultan ini memperlihatkan bahwasanya grafik melakukan pemberian pola dalam pendistribusian secara normal diakibatkan data melakukan penyebaran di sekeliling garis yang diagonal serta ikut terhadap arah dari garis yang diagonal ataupun grafik dalam bentuk histogramnya memperlihatkan pola pendistribusian secara normal.

Berlandaskan resultan dari uji normalitas pada tabel 1 bisa didapati pengetahuan bahwasanya data menyebar dengan normal. Hal tersebut bisa disimak melalui Asymp.Sig (2-tailed) dengan besaran 0,200 yang mana memperlihatkan bahwasanya angka tersebut > 0,05 yang mengakibatkan data dapat menyebar secara normal. Akibatnya model dari regresi tepat digunakan pada konteks penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Untuk mendapatkan pengetahuan terdapat ataupun tidak terdapatnya hal yang menyimpang dari autokorelasi pada penelitian ini dipakai pengujian *Durbin-Watson (DW test)*. Berlandaskan keluaran dari SPSS 26, Dengan demikian resultan pengujian autokorelasi bisa disimak dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2
 Hasil Uji Autokorelasi dengan *Durbin-Watson Test*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.437	.191	.123	.0460674	1.787
a. Predictors: (Constant), TINGKAT PEMBIAYAAN SILPA, DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, EFEKTIVITAS PAD, EFISIENSI KEUANGAN DAERAH, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH					
b. Dependent Variable: BELANJA MODAL					

Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Berlandaskan pada tabel 2 diperoleh resultan *Durbin – Watson* atau (*d*) sebesar 1,787. Menggunakan 5 variabel yang independen ($k=5$) dan sampel ($N=65$), dengan demikian berlandaskan pada tabel *Durbin-Watson*, didapatkan resultan $dL = 1,4378$ dan $dU = 1,7673$. $4 - dL = 2,5622$ dan $4 - dU = 2,2327$.

Dasar pengambilan keputusan adalah, apabila $dU < d < 4 - dU$, dengan demikian dapat diambil kesimpulan tidak terdapat Autokorelasi. Hasil perhitungan adalah: $dU (1,7673) < d (1,787) < 4 - dU (2,2327)$.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan pengujian melalui pemakaian resultan VIF (*Variance Inflation Factor*) serta toleransi atas model yang berupa regresi tersebut. Model regresi yang dilakukan pernyataan secara bebas lewat konsep multikolinieritas jikalau resultan $VIF < 10$ serta *Tolerance* lebih besar dari $> 0,10$. Inilah resultan dari pengujian multikolinieritas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	.195	5.120
DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL	.215	4.652
EFEKTIVITAS PAD	.605	1.653
EFISIENSI KEUANGAN DAERAH	.709	1.410
TINGKAT PEMBIAYAAN SILPA	.678	1.476

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

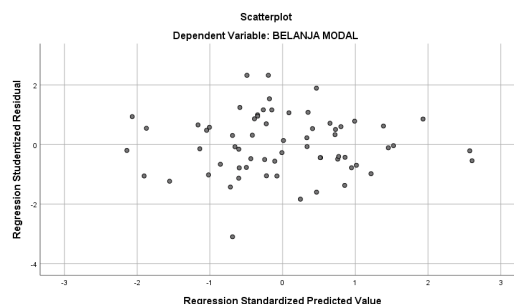
Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Berlandaskan pada tabel 3 diatas bisa disimak bahwasanya kalkulasi resultan *Tolerance* dan juga VIF. Nilai VIF bagi Kemandirian Keuangan Daerah 5,120 dengan *Tolerance* 0,195, nilai VIF Derajat Desentralisasi Fiskal 4,652 dengan *Tolerance* 0,215, nilai VIF Efektivitas PAD 1,653 dengan *Tolerance* 0,605, nilai VIF Efisiensi Keuangan Daerah 1,410 dengan *Tolerance* 0,709 dan nilai VIF Tingkat Pembiayaan SILPA 1,476 dengan *Tolerance* 0,678. Keseluruhannya melengkapi persyaratan secara bebas multikolinieritas yakni resultan $VIF < 10$ serta resultan *Tolerance* $> 0,1$. Akibatnya bisa dilakukan penarikan kesimpulan bahwasanya tidak ada fenomena multikolinieritas diantara variabel-variabel yang independen terhadap persamaan dari regresi.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilaksanakan melalui pemakaian uji Gletjer dan juga gambar *scatter plot*. Adapun resultan dari pengujian heteroskedastisitas ialah sebagai berikut:

Gambar 4
Grafik Scatterplot



Sumber: Data dilakukan pengolahan lewat SPSS 26, 2023

Berlandaskan pada gambar 4 bahwasanya bisa disaksikan resultan dari pengujian heteroskedastisitas melalui *scatter plot* dapat disimak melalui pola persebaran titik dalam konteks yang acak dan juga menyebar baik dibawah ataupun diatas dari angka 0 serta sumbu Y, yang kemudian dapat dilakukan penarikan kesimpulan bahwasanya tidak terdapat ataupun ada heteroskedastisitas.

Tabel 4
Hasil Uji Gletjer

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.11	.10		1.05	.294
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	.02	.05	.12	.45	.652
DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL	-.09	.09	-.25	-.99	.32
EFEKTIVITAS PAD	-.08	.07	-.17	-1.12	.26
EFISIENSI KEUANGAN DAERAH	-.60	.30	-.28	-1.96	.05
TINGKAT PEMBIAYAAN SILPA	.00	.01	.04	.33	.73

a. Dependent Variable: ABS_BELANJA MODAL

Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Sebagaimana asumsi uji Gletjer, persamaan regresi disebutkan tidak memiliki kandungan heteroskedastisitas jikalau resultan dari signifikansi pad avariabel yang bebas kepada absolut residual berada pada angka yang lebih besar dibandingkan $\alpha = 0,05$. Jika melihat nilai signifikansi di tabel 4, didapati semua variabel secara bebas mempunyai resultan signifikansi diatas 0,05, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa persamaan regresi tidak memiliki kandungan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi

Tabel 5
Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-.101	.104	
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	-.046	.060	-.227
DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL	.091	.136	.183
EFEKTIVITAS PAD	-.039	.025	-.227
EFISIENSI KEUANGAN DAERAH	.312	.104	.448
TINGKAT PEMBIAYAAN SILPA	-.069	.081	-.123

Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dijelaskan dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

$$Y = -0,101 - 0,046X_1 + 0,091X_2 - 0,039X_3 + 0,312X_4 - 0,069X_5 + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Nilai dari determinasi (R^2) dalam konteks ini melakukan pengukuran terkait sejauh apa kapabilitas dari model pada aspek memberikan keterangan varian dari variabel yang dependen. Nilai dari koefisien determinasi di antara satu dan juga nol. Koefisien dari R^2 yang lebih kecil mempunyai artian kapabilitas dari variabel-variabel independen pada konteks memberikan penjelasan berkenaan dengan variabel yang dependen sangat ataupun begitu terbatas. Koefisien yang mendekati satu memiliki artian variabel-variabel independen melakukan pemberian hamoir keseluruhan dari informasi yang diperlukan untuk melakukan prediksi variabel yang dependen. Koefisien dari determinasi dilakukan penentuan melalui nilai *Adjusted R Square*.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.437	.191	.123	.0460674
a. Predictors: (Constant), TINGKAT PEMBIAYAAN SILPA, DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, EFEKTIVITAS PAD, EFISIENSI KEUANGAN DAERAH, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH				

Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Berdasarkan pada tabel 6 diatas didapati angka dari *Adjusted R Square* berada pada kisaran 0,123 ataupun 12,3 persen. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya me 12,3 persen variabel yang dependen (Alokasi Belanja Modal) diberikan penjelasan dari variabel

Kemandirian Keuangan Daerah (X_1), Derajat Desentralisasi Fiskal (X_2), Efektivitas PAD (X_3), Efisiensi Keuangan Daerah (X_4) dan Tingkat Pembiayaan SiLPA (X_5), sementara sisanya berada pada besaran 87,7 persen diberikan penjelasan dari variabel yang lain yang mana tidak diikutkan atau menjadi bagian dari penelitian ini.

Uji Statistik F

Pengujian dari statistik F memperlihatkan apakah keseluruhan dari variabel yang independen yang dilakukan pemasukan pada jenis memiliki implikasi pada konteks yang bersama kepada variabel yang dependen, Hasil pengujian dari F bisa disimak dalam tabel berikut ini:

Tabel 7
Hasil Uji Statistik F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.030	4	.008	2.793	.025
	Residual	.122	59	.002		
	Total	.152	64			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL
b. Predictors: (Constant), TINGKAT PEMBIAYAAN SILPA, DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, EFEKTIVITAS PAD, EFISIENSI KEUANGAN DAERAH, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Sumber: Data dilakukan pengolahan melalui SPSS 26, 2023

Berlandaskan pada tabel 5.8 diatas bisa disimak tingkatan dari signifikansi pengujian itu berada pada angka 0,025 yang memiliki artian angkanya lebih kecil dibandingkan dengan derajat kesalahan yakni 5% ataupun bisa dilakukan penulisan ($\alpha = 0,025$) < 0,05, sedangkan F-hitung 2,793 > F-tabel 2,37. Dari resultan pengujian F ini bisa ditarik suatu kesimpulan bahwasanya H_a diterima dan juag H_0 ditolak. Dengan demikian variabel yang independen (Tingkat Pembiayaan SiLPA, Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Derajat Desentralisasi Fiskal dan juga Kemandirian Keuangan Daerah,) secara bersama-sama mempunyai pengaruh dan signifikansi kepada variabel dependen (Pengalokasian dari pembelanjaan Modal).

c. Uji Statistik t

Berlandaskan pada resultan pengujian kepada asumsi klasik, didapati model regresi itu sudah melakukan pemenuhan pada asumsi heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinieritas dan juga normalitas. Uji hipotesis dilaksanakan melalui pengujian model persamaan dari regresi setengahnya ataupun parsial kepada tiap-tiap dari variabel yang bebas. Resultan dari pengujian model regresi dalam bentuk setengah ataupun parsial didapati hasil yakni:

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (t – test) Kemandirian Keuangan Daerah

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.673	.094		-17.860	.000
	KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	.034	.043	.093	.760	.450

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Berlandaskan pada tabel 8 pengujian Parsial (t-test), koefisien *p-value* tiap-tiap variabel yang independen dalam konteks parsial memiliki pengaruh kepada variabel yang dependen dan juga hal tersebut ialah jawaban atas hipotesis yang dilakukan pengajuan terhadapnya, bahwasanya variabel variabel Kemandirian dari Keuangan Daerah tidak memiliki signifikansi dan juga pengaruh kepada pengalokasian dari pembelanjaan Modal melalui tingkatan signifikansi $0,45 > 0,05$, sementara t-hitung $0,760 < t\text{-tabel } 2,001$, atas dasar tersebutn H_1 dilakukan penolakan ataupun tidak diterima.

Tabel 9
 Hasil Uji Parsial (t – test) Derajat Desentralisasi Fiskal

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.694	.142		-11.99	.000
	DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL	.03	.090	.04	.339	.736

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Berlandaskan pada tabel 9 Uji Parsial (t-test), koefisien dari *p-value* tiap-tiap variabel yang independen dalam konteks parsial mempunyai implikasi kepada variabel yang dependen dan juga hal tersebut ialah jawaban atas hipotesis yang dilakukan pengajuan terhadapnya, bahwasanya variabel dari Derajat Desentralisasi Fiskal tidak memiliki determinan dan juga tidak mempunyai signifikansi kepada pengalokasian dari pembelanjaan modal melalui tingkatan signifikansi $0,736 > 0,05$, sementara t-hitung $0,339 < t\text{-tabel } 2,001$, atas dasar hal tersebut maka H_2 ditolak.

Tabel 10
 Hasil Uji Parsial (t – test) Efektivitas PAD

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.75	.033		-50.15	.000
	EFEKTIVITAS PAD	-.209	.117	-.219	-1.786	.079

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Berlandaskan pada tabel 10 pengujian Parsial (t-test), koefisien dari *p-value* tiap-tiap variabel yang independen pada tataran parsial memiliki determinan kepada variabel yang sifatnya dependen serta hal itu ialah jawaban terhadap hipotesis yang dilakukan pengajuan terhadapnya, bahwasanya variabel terkait keefektifan dari PAD tidak memiliki implikasi dan juga signifikansi kepada pengalokasian dari pembelanjaan Modal terhadap tingkatan dari signifikansi yang berada pada angka $0,079 > 0,05$, sementara t-hitung $-1,786 < t\text{-tabel } 2,001$, atas dasar hal tersebut H_3 ditolak.

Tabel 11
 Hasil Uji Parsial (t – test) Efisiensi Keuangan Daerah

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.752	.032		-54.71	.000
	EFISIENSI KEUANGAN DAERAH	1.711	.47	.416	3.632	.001

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Berlandaskan pada tabel 11 pengujian Parsial (t-test), koefisien *p-value* tiap-tiap variabel yang independen dalam konteks tataran parsial memiliki implikasi kepada variabel yang dependen dan hal tersebut ialah jawaban atas hipotesis yang dilakukan pengajuan terhadapnya, bahwasanya variabel Efisiensi Keuangan Daerah mempunyai signifikansi dan juga pengaruh kepada Alokasi Belanja Modal melalui tingkatan signifikan pada angka $0,001 < 0,05$, sementara t-hitung $3,632 > t\text{-tabel } 2,001$, atas dasar hal tersebut H_4 tidak ditolak atau diterima.

Tabel 12
 Hasil Uji Parsial (t – test) Tingkat Pembiayaan SiLPA

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.696	.084		-20.107	.000
	TINGKAT PEMBIAYAAN SILPA	.014	.022	.079	.632	.530

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber: Data diolah melalui SPSS 26, 2023

Berlandaskan pada tabel 5.13 pengujian Parsial (t-test), koefisien *p-value* tiap-tiap variabel yang independen dalam konteks tataran parsial memiliki implikasi kepada variabel yang dependen dan hal tersebut ialah jawaban atas hipotesis yang dilakukan pengajuan terhadapnya, bahwasanya variabel tingkatan dari Pembiayaan SiLPA tidak mempunyai signifikansi dan juga implikasi kepada pengalokasian dari pembelanjaan modal yang mempunyai tingkatan signifikansi dengan besaran angka $0,530 > 0,05$, sementara t-hitung $0,632 < t\text{-tabel } 2,001$, atas dasar tersebut H_5 ditolak.

Simpulan

Berlandaskan pada pembahasan dan juga hasil penelitian dengan alat uji statistik yang mana sudah diuraikan, dengan demikian bisa dilakukan pengambilan kesimpulan dari penelitian ini, yakni. Pertama, kinerja dari Keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SiLPA, Efisiensi Keuangan Daerah, Efektivitas PAD dan juga Derajat Desentralisasi Fiskal yang mana bersamaan memberikan pengaruh dan juga signifikansi kepada Belanja dari Modal untuk Pelayanan Publik dalam Provinsi/Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Riau. Dapat disimpulkan bahwasanya kecil ataupun besar dari belanja modal diberikan pengaruh dari daya kerja keuangan di daerah. Semakin baik kinerja keuangan maka dalam memberikan perwujudan pada pelayanan kepada publik yang mana berada pada kategori baik sudah semestinya butuh memperbesar pengalokasian dari pembelanjaan modal. Kedua, kemandirian keuangan di Daerah tidak memiliki signifikansi dan juga implikasi kepada pembelanjaan modal bagi Pelayanan Publik

berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota ataupun Kabupaten maupun Provinsi se-Provinsi Riau di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Disini bisa dilakukan penarikan kesimpulan bahwasanya kemandirian dari keuangan Pemerintah Daerah Kota ataupun Kabupaten pada Provinsi Riau belum mampu menunjukkan adanya kemampuan keuangan daerah untuk dapat memberikan kontribusi dalam mengalokasikan pembelanjaan modal. Dengan tingkatan keuangan daerah yang mana berada pada kategori rendah, sangat mungkin jumlah dana transfer dari pusat dipergunakan pemerintah daerah sebagian besarnya dipakai dalam hal belanja untuk pegawai, yang kemudian tidak memiliki implikasi kepada meningkatnya pembelanjaan dari modal.

Ketiga, derajat desentralisasi fiskal tidak mempunyai pengaruh serta tidak dikatakan memiliki signifikansi kepada pembelanjaan modal bagi pelayanan terhadap publik berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tahun 2016 hingga dengan periode waktu 2020. Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi di Provinsi Riau rerata Pendapatan Asli Daerah hanya menyumbang dikisaran 10 persen pada Pendapatan Daerah. Dapat disimpulkan bahwa Rendahnya tingkatan dari derajat desentralisasi pada konteks Fiskal ini dianggap tidak memiliki kapabilitas memberikan pengaruh pada pengalokasian dari belanja modal. Keempat, keefektifan dari PAD tidak memiliki signifikansi dan juga pengaruh kepada Belanja Modal bagi Pelayanan terhadap publik berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Riau dianggap telah mampu secara efektif merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya, namun atas pencapaian itu belum dapat memberikan kontribusi pada konteks memberi pengaruh terhadap pengalokasian dari pembelanjaan modal bagi pelayanan di sektor publik. Masih diprediksi bahwa rata-rata Pemerintah Daerah di Riau masih dominan mengalokasikan pendapatannya khususnya Pendapatan Asli Daerah untuk belanja bagi pegawai.

Kelima, efisiensi dari keuangan daerah memiliki signifikansi dan juga pengaruh kepada pembelanjaan modal bagi pelayanan di sektor publik berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota ataupun Kabupaten maupun Provinsi se-Provinsi Riau tahun 2016 hingga periode waktu 2020. Bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi efisiensi keuangan maka Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sumberdaya keuangannya untuk dialokasikan kepada program/kegiatan peningkatan pelayanan publik melalui belanja modal. Walaupun pemerintah daerah belum menekankan bagaimana dalam mencapai suatu tujuan/capaian juga perlu mempertimbangkan aspek efisiensi, namun dari hasil perhitungan memastikan bahwa Ketika Pemerintah Daerah melakukan Efisiensi, maka akan berdampak kepada Belanja Daerah, khususnya terhadap Belanja Modal. Keenam, tingkatan pembiayaan SiLPA tidak mempunyai signifikansi dan juga pengaruh bagi pembelanjaan modal bagi Pelayanan Publik berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten se-Provinsi Riau tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruhnya dikarenakan rendahnya jumlah persentase kontribusi SiLPA terhadap pemenuhan alokasi Belanja Daerah, bisa dipastikan bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Riau akan lebih memprioritaskan Belanja Pegawai dan Belanja Barang sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Referensi

- Agustina, O. (2013). *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Andriyani, N., Mukhzarudfa, E.D.P. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Jambi 2014-2018)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi.
- Anjani, E.S.D., Akram. (2015). *Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat*. Vol 11, No. 1 Hal 1-21.
- Assyurriani, R. (2015). *Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2013*. Jurnal. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Ayu, P.P. (2018). *Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat*. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri.
- Halim, A. (2012), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hidayat, M. F. (2013). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Lane, J.E. (2014). *Rule of law in Africa and Asia: Solving the Principal-Agent Problem*. Journal of Public Administration and Policy Research, 6(7), 164-173.
- Manik T., Suprihartini, L. (2013). *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Manajemen Publik Melalui Pengukuran Value For Money dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Belanja Modal*, JEMI Vol 2.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyana, S., Slamet. (2006). *Keuangan Daerah; Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta: LPKAP Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPKP).
- Novita, I., Nurhasanah, N. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat periode Tahun Anggaran 2012-2017)*. Vol.4 No.2. Thesis Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Putro, S.N. (2010). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Prakarsa, F.D. (2014). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)*. Jurnal FEB. Universitas Brawijaya.
- Pramudya, F.K., Abdullah, M.F. (2021). *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

- Prantini. (2014). *Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Kalimantan Barat*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura.
- Prasasti, S.E. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013)*. Repository Universitas PGRI Yogyakarta.
- Pratiwi, Susan, (2014). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, ROA, NIM, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Indonesia*. Jurnal Manajemen Bisnis. Vol 5, No.2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahayu, S., Rinta S.P. (2017). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Akuntansi Audit dan Sistem Informasi Akuntansi. Vol 3 No.2. Universitas Telkom.
- Rajab, A. (2020). *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Mamuju
- Riswan. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan*. Jurnal Universitas Bandar Lampung.
- Setiawan, A. (2010). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sularso, H., Yanuar, E. R. (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, Vol 1, No.2.
- Syaiful. (2006). *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Artikel.
- Tiara, F.E. (2016). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol.4 No.2 Universitas Brawijaya.